
**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia:
Suatu Analisis dengan Model Regresi Data Panel**

Muana Nanga

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Pradita Tangerang Banten

email: muana.nanga@pradita.ac.id

ABSTRACT

Income distribution is one of the important factors determining the effectiveness of growth in reducing poverty. This study examines the factors determining income distribution in Indonesia. The results of econometric analysis show that income distribution in Indonesia strongly affected by human capital, real per capita income, real minimum wages, and inflation. Human capital, real per capita income and inflation tends to equalizing on income distribution, while real minimum wages tend to have disequalizing effects on income distribution. The results also show that Kuznets U curve hypothesis is empirically confirmed.

Keywords:

Income distribution, Lorenz curve, human capital. PGIT triangle hypothesis, panel data regression model

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah atau issue serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan pendapatan tersebut bahkan telah dianggap sebagai inti dari berbagai masalah pembangunan (*the core of all development problems*) dan sekaligus menjadi sebagai tujuan utama dari kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro & Smith, 2011). Selain itu, ketimpangan pendapatan juga dianggap menjadi masalah atau *issue* yang serius karena ternyata memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan-tujuan pembangunan yang lainnya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*)¹.

1 Pembahasan yang cukup menarik tentang bagaimana saling keterkaitan diantara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan dapat dibaca pada tulisan Andrew Goudie dan Paul Ladd, yang berjudul "Economic Growth, Poverty and Inequality", *Journal of International Development*, No. 11, 1999, hal. 177-195.

Bourguignon (2004) merupakan salah satu diantara banyak ahli ekonomi yang telah melakukan kajian secara intensif tentang bagaimana saling keterkaitan diantara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Menurut pendapatnya, diantara kemiskinan (*poverty*), ketimpangan pendapatan (*income inequality*), dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) terdapat hubungan segitiga satu dengan lainnya. Adanya hubungan segitiga inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hipotesis hubungan segitiga ketimpangan-pertumbuhan-kemiskinan (*Poverty-Growth-Inequality Triangle hypothesis*) atau disingkat PGIT hypothesis. Ketimpangan pendapatan menurut Bourguignon menentukan sejauhmana pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu atau efektif dalam mengurangi kemiskinan yang ada. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi hanya akan efektif dalam mengurangi kemiskinan apabila hal tersebut diikuti atau dibarengi dengan pembagian pendapatan yang semakin merata. Tetapi apabila pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi, maka efektivitas dari pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan tidak akan maksimal. Jadi dengan demikian menjadi semakin jelas bahkan ketimpangan pendapatan itu merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam memecahkan masalah kemiskinan yang dihadapi.

Namun demikian, ahli ekonomi yang dapat dikatakan merupakan pelopor dalam kajian tentang ketimpangan pendapatan ini adalah Simon Kuznets (1955). Kuznets mengembangkan sebuah hipotesis, yang belakangan di dalam kepustakaan ilmu ekonomi pembangunan dikenal secara luas dengan istilah hipotesis kurva U terbalik dari Kuznets (*Kuznets' inverted U shaped curve hypothesis*) (Kuznets, 1955). Hipotesis kurva U terbalik dari Kuznets tersebut menyatakan bahwa pada tahap-tahap awal dari pembangunan ekonomi, pembagian pendapatan akan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya seiring dengan semakin majunya suatu perekonomian, ketimpangan pendapatan tersebut akan semakin membaik atau berkurang. Dengan kata lain, Kuznets ingin menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam sebuah perekonomian itu sangat dipengaruhi oleh transformasi dan perkembangan ekonomi yang terjadi. Hipotesis kurva U terbalik dari Kuznets tersebut kemudian telah menjadi tonggak yang sangat penting di dalam studi tentang hubungan antara tingkat perkembangan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan pendapatan.

Studi lain tentang distribusi pendapatan dilakukan oleh Ahluwalia (1976), yang menyebutkan faktor-faktor penentu ketimpangan pendapatan seperti: tingkat dan laju GNP per kapita, pendidikan dan tingkat melek huruf sumberdaya manusia, struktur produksi (*share* pertanian di dalam GDP), *share* penduduk perkotaan, karakteristik demografis (jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk), aktivitas pemerintah (*share* penerimaan pemerintah di dalam GDP) dan faktor-faktor lainnya. Sementara Odedokun & Round (2004) menyebutkan sejumlah faktor sebagai penentu ketimpangan pendapatan, yaitu: tingkat perkembangan ekonomi (pendapatan per kapita) dan faktor regional, faktor fiskal (pengeluaran pemerintah), inflasi dan siklus ekonomi, kebijakan anti korupsi, keterbukaan ekonomi (*openess*), ketersediaan sumber daya manusia (*human capital*) dan sumber daya alam, dan proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian. Ahli lainnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Iradian (2005) yang menyebutkan faktor-faktor penentu ketimpangan pendapatan seperti tingkat pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan penduduk, dan angka partisipasi sekolah tingkat SLTP.

Bertitik tolak dari pendapat para ahli dan hasil studi empirik yang pernah dilakukan selama ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang berbagai faktor yang memengaruhi ketimpangan pembagian pendapatan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang diduga memengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia, diantaranya tingkat perkembangan modal manusia (*human capital*), tingkat perkembangan ekonomi (*level economic development*), tingkat inflasi (*inflation rate*), tingkat pengangguran (*unemployment rate*) dan tingkat upah tenaga kerja (*wages*). Sejalan dengan itu, maka yang menjadi tujuan dari studi atau penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana dan seberapa kuat pengaruh modal manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, (2) untuk mengetahui bagaimana dan seberapa kuat pengaruh tingkat perkembangan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, (3) untuk mengetahui bagaimana dan seberapa kuat pengaruh tingkat inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, (4) untuk mengetahui bagaimana dan seberapa kuat pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, dan (5) untuk mengetahui bagaimana dan seberapa kuat pengaruh upah tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pembagian Pendapatan: Konsep dan Ukuran

Secara teoritis, pembagian pendapatan dibedakan ke dalam dua jenis yaitu pembagian pendapatan pribadi (*personal distribution of income*), dan pembagian pendapatan fungsional (*functional income distribution*). Pembagian pendapatan pribadi menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima berbagai kelas individu atau keluarga (miskin, menengah, dan kaya); dan sering diinterpretasikan sebagai ukuran langsung dari kesejahteraan (Perkins, et. al. 2001). Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Dengan perkataan lain, pembagian pendapatan pribadi adalah cara pembagian pendapatan dimana individu atau keluarga atau rumah tangga diurutkan berdasarkan besarnya pendapatan yang diterima, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, tanpa memperdulikan dari mana pendapatan itu berasal. Karena pembagian pendapatan disini didasarkan pada besarnya pendapatan, maka sering juga pembagian pendapatan pribadi ini dikenal dengan istilah lain yaitu '*size distribution of income*'. Sedangkan pembagian pendapatan fungsional (*functional distribution of income*) adalah cara pembagian pendapatan dimana data pendapatan nasional diklasifikasikan berdasarkan alokasinya diantara faktor-faktor produksi (Killick, 1981). Cara pembagian pendapatan ini lebih melihat pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, dalam bentuk upah, sewa, bunga dan laba. Atau melihat bagaimana share dari pendapatan masing-masing faktor produksi tersebut dalam pendapatan nasional secara keseluruhan. Itulah sebabnya, '*functional distribution of income*' ini juga sering dikenal dengan istilah '*factor share income distribution*' (Perkins et.al., 2001; Todaro & Smith, 2011).

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan, ada beberapa ukuran yang selama ini digunakan oleh para ahli, diantaranya adalah rasio Kuznets, koefisien atau rasio GINI, kurva *Lorenz*, dan koefisien variasi (Todaro & Smith, 2011). Namun dalam studi ini ukuran yang digunakan adalah koefisien atau rasio GINI (*GINI Ratio*). Koefisien GINI (*Gini coefficient*) atau disebut juga indeks GINI (*Gini index*) adalah ukuran ketimpangan yang bersifat agregat, yang nilainya terletak antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin mengecil atau pembagian pendapatan yang semakin merata, dan sebaliknya semakin mendekati 1, berarti ketimpangan pendapatan semakin membesar atau pembagian pendapatan semakin timpang. Dalam

prakteknya, koefisien GINI untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang pembagian pendapatan relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro & Smith, 2011).

Kaitan Antar Variabel yang Digunakan

Modal Manusia dan Ketimpangan Pendapatan

Studi tentang kaitan antara modal manusia (*human capital*) dengan ketimpangan pendapatan telah dilakukan sejumlah ahli di berbagai negara termasuk Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Perugini & Martino (2008), Mughal & Diawara (2011), dan Tridico (2010) menemukan bahwa modal manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks GINI. Hal ini menunjukkan bahwa HDI cenderung berdampak ‘*equalizing*’ terhadap pembagian pendapatan. Kedua ahli tersebut menggunakan proksi yang berbeda-beda untuk mengukur modal manusia (*human capital*)².

Adapun studi yang dilakukan De Gregorio & Lee (2002) yang menggunakan data lintas negara, Perugini & Martino (2008), yang melakukan studi di dalam wilayah Eropa, menemukan modal manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. De Gregorio & Lee (2002) dan Perugini & Martino (2008) menggunakan masing-masing ketimpangan dalam pendidikan (*educational inequality*) dan angka melek huruf (*literacy rate*) sebagai proksi dari modal manusia, di mana pendidikan yang diukur dengan ketimpangan dalam pendidikan (*educational inequality*) ditemukan berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa modal manusia tersebut cenderung berdampak *disequalizing* atau memperburuk keadaan ketimpangan pendapatan yang ada.

Tingkat Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

2 Mughal dan Diawara (2009) menggunakan angka partisipasi sekolah tingkat SLTP (APS) (*gross secondary enrollment*) dan angka partisipasi sekolah (APS) tingkat SLTA (*gross tertiary enrollment*) APS tingkat SLTA) sebagai proksi dari modal manusia; Tridico (2009) menggunakan angka partisipasi sekolah tingkat SLTP (APS) (*gross secondary enrollment*) dan angka partisipasi sekolah (APS) tingkat SLTA (*gross tertiary enrollment*) APS tingkat SLTA) sebagai proksi dari modal manusia; dan Perugini dan Martino (2008) menggunakan capaian pendidikan (*educational attainment*) sebagai proksi dari modal manusia.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Kuznets (1955), merupakan ahli yang mempelopori studi tentang bagaimana kaitan antara pembagian pendapatan dan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan menggunakan data *cross-section* dan data *time series* dari berbagai survei di setiap negara, Simon Kuznets menemukan adanya hubungan antara ketimpangan pembagian pendapatan dan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara, yang dalam hal ini diukur dengan pendapatan per kapita yang berbentuk kurva U terbalik, dimana pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi ketimpangan pendapatan tersebut cenderung memburuk, dan kemudian membaik seiring dengan semakin majunya suatu perekonomian atau negara. Berbagai studi yang dilakukan kemudian oleh sejumlah ahli, yang pada umumnya menggunakan data lintas negara (*cross-country data*) berhasil membuktikan kebenaran dari hipotesis dari Kuznets tersebut. Namun, sebagian lain dari studi tersebut menolak (*not supported*) pendapat atau hipotesis kurva U terbalik dari Kuznets³.

Namun terlepas dari perdebatan atau kontradiksi tentang hipotesis kurva U terbalik dari Kuznets tersebut, yang pasti adalah bahwa tingkat pembangunan atau perkembangan ekonomi (pendapatan per kapita) merupakan faktor yang sangat penting dan memiliki pengaruh terhadap pembagian pendapatan di dalam suatu perekonomian atau negara. Hal ini antara lain dibuktikan oleh Diah-Utari & Christina (2015) yang melakukan studi untuk kasus Indonesia dengan menggunakan data panel (26 Provinsi dan kurun waktu 2000-2011).

Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan

Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang memiliki pengaruh terhadap pembagian pendapatan di dalam suatu negara. Berbagai studi untuk membuktikan secara empirik pengaruh inflasi terhadap pembagian pendapatan telah dilakukan para ahli, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penelitian-penelitian yang pernah

3 Studi-studi yang mendukung pendapat atau hipotesis Kuznets diantaranya adalah Kravis (1960), Oshima (1962), Adelman dan Morris (1973), Paukert (1973), Chenery dan Syrquin (1976), Ahluwalia (1976), Lecallion et al (1984), Randolph dan Lott (1993), Mbaku 1997), Chang dan Ram (2000), De Gregorio dan Lee (2002), Iradian (2005), Jamal (2006), dan Keller (2007); sedangkan yang menolak antara lain adalah Bacha (1977), Saith (1983), Ram (1984), Papanek dan Kyn (1986), Randolph and Lott (1993), Anand dan Kanbur (1993), Jha (1996), dan Deininger and Squire (1996,1998).

dilakukan para ahli selama ini diantaranya adalah penelitian Galli & van derHoeven (2001) untuk kasus Amerika Serikat ; Li & Zou (2002), yang melakukan penelitian lintas negara (*cross-country study*); Bittencourt (2009) yang meneliti tentang kaitan antara kinerja makroekonomi dan ketimpangan di Brazil 1983-1994; Jamal (2006) untuk kasus Pakistan; dan Law & Tan (2009) di Malaysia menemukan bahwa inflasi yang tinggi cenderung berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti inflasi yang tinggi cenderung semakin memperburuk ketimpangan dalam pembagian pendapatan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Abounoori (2003) yang juga menggunakan data lintas negara, menemukan bahwa inflasi cenderung berdampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (indeks GINI), yang menunjukkan bahwa inflasi cenderung bersifat *'equalizing'* terhadap pembagian pendapatan, yang berarti bertolak belakang dengan temuan-temuan sebelumnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yue (2011) di Korea Selatan menemukan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembagian pendapatan, atau dengan kata lain, tidak cukup bukti empirik yang mendukung bahwa inflasi berhubungan dengan pembagian pendapatan di Korea.

Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan

Pengangguran adalah faktor lain yang diduga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembagian pendapatan di dalam suatu negara atau perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh Abounoori (2003) di Iran, menemukan bahwa pengangguran cenderung berdampak positif terhadap indeks GINI dan share pendapatan dari kelompok 10 persen terkaya, sebaliknya berdampak negatif terhadap share pendapatan dari kelompok 20 persen termiskin, namun semuanya tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Bittencourt (2009) untuk kasus Brazil, menemukan bahwa pengangguran yang diestimasi dengan menggunakan model efek tetap (*fixed effect model* atau FEM) berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan koefisien variasi (*coefficient of variation*). Hal ini berarti bahwa tingkat pengangguran yang tinggi semakin memperburuk ketimpangan pendapatan, dan sebaliknya.

Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan

Studi tentang kaitan antara upah minimum dan ketimpangan pendapatan, masih relatif terbatas dibandingkan misalnya studi tentang kaitan antara upah minimum dengan kemiskinan, atau kaitan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran dan tingkat kesempatan kerja. Penelitian yang pernah dilakukan para ahli antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryahadi et al (2003) yang meneliti tentang dampak kebijakan upah minimum terhadap kesempatan kerja di sektor formal perkotaan (*urban formal sector*). Mereka menyimpulkan bahwa (1) kenaikan upah minimum berdampak negatif terhadap kesempatan kerja sektor formal perkotaan (kecuali untuk pekerja berkerah putih); (2) dampak negatif paling besar dari kenaikan upah minimum terutama sekali dialami oleh kelompok-kelompok yang rentan terhadap perubahan di dalam kondisi pasar tenaga kerja seperti kaum perempuan, tenaga kerja usia muda dan tidak terampil yang merupakan bagian terbesar di dalam angkatan kerja Indonesia. Penelitian lain adalah yang dilakukan oleh Bird & Manning (2005) untuk kasus Indonesia menyimpulkan bahwa kebijakan upah minimum tidak efektif dalam menjangkau kaum miskin karena hasil simulasi yang mereka lakukan menunjukkan bahwa separuh dari kenaikan upah minimum tersebut dinikmati oleh penduduk yang tidak miskin, sedangkan kelompok hampir miskin (*near poor*) dan kelompok miskin (*poor*) hanya menikmati masing-masing sebesar 17 persen dan 34 persen dari kenaikan upah minimum tersebut.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Volscho (2005) di Amerika Serikat yang menggunakan data untuk kurun waktu 1960-2000, menemukan bahwa upah minimum tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks GINI. Artinya, penetapan upah minimum disini berdampak *equalizing* terhadap pembagian pendapatan di Amerika Serikat. Sejalan dengan temuan Volscho (2005), penelitian yang dilakukan Bird & Manning (2008) juga menemukan bahwa upah minimum berdampak menurunkan ketimpangan pendapatan, walaupun dengan penurunan yang relatif lebih kecil. Penelitian lain adalah yang dilakukan Atlas & Cameron (2008) yang bahwa upah minimum di Indonesia berdampak negatif terhadap kesempatan kerja, terutama terhadap kesempatan kerja di sektor usaha kecil. Penelitian yang dilakukan Chun & Khor (2010), yang meneliti tentang upah minimum dan perubahan ketimpangan upah di Indonesia menyimpulkan bahwa penetapan upah minimum memiliki peranan yang penting di dalam mengurangi ketimpangan upah (*wage inequality*) di

Indonesia dengan cara menaikkan tingkat upah dari para pekerja individual di sektor formal yang awalnya memiliki upah bulanan di bawah 90 persen dari standar upah bulanan minimum.

METODA PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* (2007-2013) dan data *cross-section* (33 Provinsi). Seluruh data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seperti: (1) Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia (berbagai edisi), (2) Laporan Perekonomian Indonesia (berbagai edisi), (3) Statistik Upah (berbagai edisi), (4) Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha (berbagai edisi), (5) Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia (berbagai edisi), (6) Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro (berbagai edisi), dan lain-lain.

Model Analisis, Spesifikasi Model, dan Metode Estimasi

Model analisis yang digunakan adalah model regresi data panel (*panel data regression model*), yaitu regresi yang menggunakan data gabungan (*panel pooled data*) antara data *time series* dan data *cross-section*.

Spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$GINI = e_0 + e_1HC + e_2YC + e_3SQYC + e_4INFL + e_5UNEM + e_6RWG + e_0 \dots \dots \dots [3.1]$$

dimana,

GINI	= indeks GINI
HC	= modal manusia diproksi dengan APS tingkat SLTP (persen)
YC	= PDRB per kapita riil (Rp jutaan)
SQYC	= kuadrat dari PDRB per kapita riil (Rp jutaan)
INFL	= tingkat inflasi regional (persen)

UNEM	= tingkat pengangguran regional (persen)
RWG	= upah minimum Provinsi riil (Rp jutaan)
e	= faktor pengganggu (<i>disturbance error</i>)

Untuk mengestimasi model regresi data panel tersebut di atas, digunakan metode Efek Tetap (*Fixed Effect Model* atau FEM) dan metode efek random (*Random Effect Model* atau REM). Dalam hal dimana diduga ada persoalan heteroskedastisitas di dalam model⁴, maka akan digunakan metode '*Estimated Generalized Least Squares*' (EGLS method), atau disebut juga *Weighted Least Squares* (WLS method). Dengan penggunaan metode EGLS atau WLS ini diharapkan masalah heteroskedastisitas yang kemungkinan besar muncul di dalam model dapat diatasi.

Hipotesis

Berkaitan dengan masalah yang diajukan untuk diteliti, ada beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk dibuktikan kebenarannya secara empirik. Hipotesis-hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H1: Modal manusia diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

H2: Pendapatan atau GDRP riil per kapita diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

H3: Kuadrat dari pendapatan (GDRP) riil per kapita diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

H4: Inflasi diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

H5: Pengangguran diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

H6: Upah minimum provinsi diduga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

⁴ Lihat Ramanathan (1992), *Introductory Econometrics with Applications*. Second Edition, hal. 344-349, dan Gujarati (2004), *Basic Econometrics*. 5th Edition. McGraw-Hill, New York.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi tentang Kondisi Pembagian Pendapatan di Indonesia

Dengan mengacu kepada kriteria yang dikemukakan oleh Chenery, et.al. (1974) dari Bank Dunia, dan koefisien Gini dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, ketimpangan pembagian pendapatan di daerah perkotaan di Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) ternyata masih berada dalam kategori ketimpangan sedang (*moderate inequality*) dimana share pengeluaran dari kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah masih lebih kecil dari 17 persen.

Kedua, pembagian pendapatan di daerah perdesaan di Indonesia selama kurun waktu yang sama (2014-2018) umumnya lebih merata dan termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (*low inequality*) dimana share pengeluaran dari kelompok 40 persen berpendapatan terendah lebih besar dari 17 persen, yaitu berkisar antara 20.15-21.03 persen.

Ketiga, secara agregat pembagian pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 2014-2018 tersebut juga telah menunjukkan ketimpangan pendapatan yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (*moderate inequality*), dimana *share* pengeluaran dari kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah sudah berada di atas angka 17 persen (berkisar 17.02-17.29 persen)⁵.

Namun apabila dilihat dari angka koefisien GINI, dapat dikemukakan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan ternyata masih tergolong dalam ketimpangan sedang (*moderate inequality*) karena nilainya masih berada pada kisaran 0.35-0.50. Sedangkan untuk daerah perdesaan, ketimpangan pendapatannya sudah termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (*low inequality*) karena nilainya berada pada kisaran 0.20-0.35. Sedangkan secara agregat, koefisien GINI Indonesia selama kurun waktu 2014-2018, berada pada kisaran 0.38-0.41, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (*moderate inequality*).

⁵ Sumber dikutip dari Buku "Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Tahun 2018", Tabel 3.1 (Diolah).

Hasil Estimasi Model Pembagian Pendapatan di Indonesia

Hasil estimasi model pembagian pendapatan yang dilakukan metode efek tetap (FEM) dan menggunakan paket program *Eviews* versi 6, secara lengkap disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Peubah	Model FEM		Model REM	
	Koefisien	Nilai t	Koefisien	Nilai t
C	0.197504	4.875527*	0.338521	10.42608
HC?	-0.001237	-2.445344**	0.000219	0.465537
YC?	0.030482	7.085362*	0.000676	0.363054
SQYC?	-0.000281	-5.152433*	9.78E-06	0.252653
INFL?	-0.001333	-3.486936*	-0.002007	-3.949300*
UNEM?	0.000373	0.242757	-0.005736	-4.519808*
RWG?	0.031720	2.090850**	0.062333	4.852912*
Adj. R ²	0.817575		0.327934	
F Statistic	28.12603*		19.70470	
DW Statistic	1.628811		1.108695	
N	231		231	

Catatan: * = signifikan pada $\alpha = 1$ persen

** = signifikan pada $\alpha = 5$ persen

Untuk menentukan metode manakah diantara kedua metode estimasi tersebut, yaitu FEM dan REM yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengestimasi model yang ada, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Hausman (*Hausman test*). Hasilnya menunjukkan bahwa uji Hausman dengan menggunakan Kai kuadrat (*Chi-square*) ternyata signifikan pada $\alpha = 5$ persen, yang berarti model FEM adalah lebih tepat untuk digunakan dalam mengestimasi model.

Berdasarkan hasil estimasi model, yaitu dengan metode FEM dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pengaruh Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa variabel modal manusia (*human capital*) memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang diukur dengan menggunakan ukuran indeks GINI. Hal ini berarti bahwa peningkatan dalam modal manusia, yang dalam hal ini diukur dengan angka partisipasi murni (APM) sekolah tingkat SLTP (*gross secondary school enrollment*) cenderung berdampak mengurangi atau memperbaiki ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan kata lain, variabel modal manusia tersebut cenderung menyebabkan '*equalizing effect*' terhadap pembagian pendapatan di Indonesia. Artinya, dengan semakin meningkatnya modal manusia, maka akan menyebabkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan juga semakin berkurang.

Temuan dalam studi ini, sejalan dengan temuan Keller (2010), Tridico (2010), Mughal & Diawara (2011), dan Iradian (2005). Dengan menggunakan data lintas negara (*cross country*), studi-studi tersebut menemukan variabel modal manusia yang diproksi dengan angka partisipasi sekolah tingkat SLTP (*secondary school enrollment*), justru cenderung berdampak '*equalizing*' terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, Mughal & Diawara (2011) juga menemukan modal manusia yang dalam hal ini diukur dengan angka partisipasi sekolah tingkat SLTA (*tertiary school enrollment*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tetapi ketika mereka menggunakan ukuran rata-rata lama sekolah (*average years of schooling*) sebagai ukuran dari modal manusia, keduanya menemukan hal yang sebaliknya, dimana modal manusia tersebut justru berdampak '*disequalizing*' terhadap ketimpangan pendapatan.

Namun demikian, temuan dalam penelitian ini bertolak belakang dengan hasil temuan dari Kumba (2010). Kumba (2010) yang melakukan penelitian di Indonesia dengan menggunakan analisis *cross-section* (data 23 Provinsi dan periode waktu 1996-2005) menemukan bahwa modal manusia yang diukur dengan rata-rata lama sekolah (*average years of schooling*) cenderung berdampak *disequalizing effect* terhadap distribusi pendapatan, artinya perbaikan dalam modal manusia cenderung membuat ketimpangan pendapatan semakin memburuk (*worse-off*).

Dari berbagai temuan di atas, tampaknya bahwa variabel modal manusia tersebut cenderung berdampak negatif (*equalizing*) terhadap ketimpangan dalam pembagian pendapatan pada studi-studi yang bersifat lintas negara (*cross-country*); sedangkan pada studi-studi *cross region* di dalam

suatu negara (*individual country*) cenderung berdampak sebaliknya, yaitu berpengaruh positif (*disequalizing*) terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, di dalam menarik suatu kesimpulan berkaitan dengan pengaruh modal manusia terhadap ketimpangan pendapatan tersebut, hendaknya lebih hati-hati dan tidak gegabah. Hal ini disebabkan karena ternyata ukuran yang digunakan dalam mengukur variabel modal manusia tersebut sangat menentukan bagaimana pengaruh dari variabel modal manusia tersebut terhadap ketimpangan dalam pembagian pendapatan itu. Namun, terlepas dari pengaruhnya yang positif atau negatif terhadap ketimpangan pendapatan, modal manusia yang dalam hal ini diukur dengan angka partisipasi sekolah tingkat SLTP, jelas merupakan variabel atau faktor penentu yang penting dari pembagian pendapatan di dalam suatu negara, termasuk dalam hal ini Indonesia.

Pengaruh Tingkat Perkembangan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berkaitan dengan pengaruh dari tingkat perkembangan ekonomi (*level of economic development*) yang diukur dengan pendapatan atau PDRB per kapita riil, temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa variabel PDRB riil per kapita dan kuadrat dari PDRB riil per kapita tersebut berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, masing-masing dengan tanda positif dan negatif. Hal ini menguatkan pendapat bahwa fenomena kurva U terbalik dari Kuznets (hipotesis Kuznets) berlaku di Indonesia.

Temuan dalam studi ini sejalan dengan temuan dari para peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian dengan menggunakan data lintas negara (*cross country*) seperti Keller (2010), Mughal & Diawara (2011), dan Iradian (2005), Amornthum (2004), De Gregorio & Lee (2002), yang menemukan GDP per kapita dan kuadrat dari GDP per kapita memiliki pengaruh masing-masing dengan tanda positif dan negatif serta signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, temuan dalam studi ini juga sejalan dengan temuan-temuan dari para ahli sebelumnya yang melakukan penelitian dengan menggunakan data *specific country*, seperti temuan Jamal (2006) untuk kasus Pakistan dan Diah-Utari & Christina (2015) untuk kasus Indonesia.

Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Inflasi merupakan salah satu variabel makro yang penting dan memiliki pengaruh terhadap kinerja makroekonomi suatu negara. Dalam studi ini, ditemukan bahwa inflasi ternyata tidak memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang dalam hal ini diukur dengan indeks GINI. Hal ini berarti bahwa kenaikan tingkat inflasi di Indonesia cenderung bersifat '*equalizing*' terhadap pembagian pendapatan. Temuan dalam studi ini sejalan dengan temuan dari Abounoori (2003) dan Maestri & Roventini (2012) yang menemukan bahwa inflasi tersebut cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan. Lebih jauh Abounoori (2003) yang melakukan studi lintas negara mengungkapkan bahwa inflasi cenderung berdampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang dalam hal ini diukur dengan indeks GINI), dan positif terhadap *share* pendapatan dari kelompok 20 persen termiskin, tetapi tidak signifikan. Tetapi berdampak negatif dan signifikan terhadap *share* pendapatan dari kelompok 10 persen terkaya. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi cenderung bersifat '*equalizing*' terhadap pembagian pendapatan, yang berarti bertolak belakang dengan temuan-temuan sebelumnya.

Namun demikian, temuan dalam penelitian ini bertolak belakang dengan temuan dari banyak studi yang pernah dilakukan para ahli selama ini, seperti temuan dari Galli & van der Hoeven (2001), Bulir (2001), Li & Zou (2002), dan Albanesi (2007). Galli & van der Hoeven (2001) yang melakukan penelitian untuk kasus Amerika Serikat, menemukan bahwa inflasi yang tinggi cenderung berdampak memperburuk ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Bulir (2001) menemukan adanya hubungan yang bersifat non-liner antara inflasi dan ketimpangan pendapatan yang akan membentuk kurva U terbalik. Li & Zou (2002), yang melakukan penelitian lintas negara (*cross-country*), menemukan bahwa inflasi cenderung berdampak positif, baik terhadap indeks GINI maupun *share* pendapatan dari kelompok 20 persen terkaya, dan berdampak negatif terhadap *share* pendapatan dari kelompok 20 persen termiskin. Albanesi (2007) menemukan adanya korelasi positif yang kuat (*strong positive correlation*) antara inflasi dan ketimpangan pendapatan untuk 51 negara industri dan negara sedang berkembang antara tahun 1966 dan 1990.

Galli & van der Hoeven (2001) memberikan suatu catatan penting bahwa inflasi bisa saja menyebabkan ketimpangan pendapatan itu semakin memburuk atau membaik. Hal tersebut sangat

tergantungan pada tingkat inflasi yang dialami suatu negara pada awalnya (*initial inflation rate*) nya seperti apa. Dalam kondisi dimana suatu negara tingkat inflasinya sudah tinggi, maka kenaikan tingkat inflasi yang terjadi akan cenderung menyebabkan ketimpangan pendapatan itu semakin memperburuk atau meningkat. Tetapi sebaliknya apabila tingkat inflasi yang dialami suatu negara masih rendah, maka kenaikan inflasi yang terjadi akan cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan yang ada.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ternyata cenderung memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pendapatan meskipun secara statistik tidak signifikan. Artinya, tingkat pengangguran terbuka yang semakin meningkat cenderung akan memperburuk ketimpangan dalam pembagian pendapatan di Indonesia.

Berbagai penelitian yang dilakukan para ahli di berbagai negara menemukan bahwa pengangguran yang tinggi cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan yang ada. Sebagai contoh, temuan Abounoori (2003) untuk kasus Iran, Bittencourt (2009) untuk kasus Brazil, serta Checchi & García-Penalosa (2010) dan Maestri & Roventini (2012) keduanya untuk kasus negara-negara anggota OECD, semuanya menemukan bahwa pengangguran cenderung berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, bahwa pengangguran yang semakin meningkat tersebut cenderung memperburuk keadaan distribusi pendapatan yang ada.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa upah minimum (UMP) yang diterapkan di Indonesia selama ini ternyata cenderung berdampak memperburuk ketimpangan pendapatan yang ada. Artinya, kenaikan upah minimum tersebut berdampak cenderung menyebabkan '*disequalizing effect*' terhadap pembagian pendapatan di Indonesia. Temuan dalam studi ini sejalan dengan temuan Suryahadi et al (2003), Bird & Manning (2008), dan Alatas & Cameron (2008); tetapi bertolak belakang dengan temuan Chun & Khor (2010), yang menemukan bahwa penetapan upah minimum memiliki peranan yang penting di dalam mengurangi ketimpangan upah

(*wage inequality*) di Indonesia. Hal ini pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Suryahadi et al (2003) yang meneliti tentang dampak kebijakan upah minimum terhadap kesempatan kerja di sektor formal perkotaan (*urban formal sector*) diantaranya menyimpulkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak negatif terhadap kesempatan kerja sektor formal perkotaan (kecuali untuk pekerja berkerah putih); dan dampak negatif paling besar dari kenaikan upah minimum terutama sekali dialami oleh kelompok-kelompok yang rentan terhadap Perubahan di dalam kondisi pasar tenaga kerja seperti kaum perempuan, tenaga kerja usia muda dan tidak terampil yang merupakan bagian terbesar di dalam angkatan kerja Indonesia. Bird & Manning (2008) yang juga melakukan penelitian untuk kasus Indonesia menyimpulkan bahwa kebijakan upah minimum tidak efektif dalam menjangkau kaum miskin dan bahwa separuh dari kenaikan upah minimum tersebut dinikmati oleh penduduk yang tidak miskin (*non-poor*), sedangkan kelompok hampir miskin (*near poor*) dan kelompok miskin (*poor*) hanya menikmati masing-masing sebesar 17 persen dan 34 persen dari kenaikan upah minimum tersebut.

Namun demikian, temuan dalam studi ini bertolak belakang dengan temuan dari Volscho (2005), dan Alatas & Cameron (2008). Volscho (2005) yang meneliti tentang kaitan antara upah minimum dan ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat selama kurun waktu 1960-2000, menemukan bahwa upah minimum tersebut berdampak cenderung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini. Temuan lain diungkapkan oleh Alatas & Cameron (2008) yang juga melakukan studi di Indonesia dimana mereka menemukan bahwa upah minimum di Indonesia berdampak negatif terhadap kesempatan kerja, terutama terhadap kesempatan kerja di sektor usaha kecil.

Secara bersama-sama kelima peubah bebas yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu modal manusia, tingkat perkembangan ekonomi, inflasi, pengangguran dan upah minimum Provinsi mampu menjelaskan 81,76 persen dari variasi yang terjadi pada peubah ketimpangan pendapatan (*income inequality*) di Indonesia. Selebihnya, yaitu sebesar 18,24 persen dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa kesimpulan penting yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, modal manusia, tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dengan pendapatan per kapita dan tingkat inflasi merupakan variabel yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, kedua variabel tersebut cenderung memiliki pengaruh yang bersifat ‘*equalizing*’ terhadap pembagian pendapatan di Indonesia. Artinya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan yang di Indonesia selama ini

Kedua, fenomena kurva U terbalik dari Simon Kuznets ditemukan berlaku di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi variabel pendapatan per kapita dan kuadrat dari variabel pendapatan per kapita tersebut yang memiliki tanda positif dan negatif.

Ketiga, upah minimum provinsi yang diberlakukan selama ini cenderung berdampak positif, dalam cenderung memperburuk (*disequalizing*) terhadap pembagian pendapatan di Indonesia di Indonesia. Penetapan upah minimum selama ini ternyata cenderung menguntungkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (kelompok 20 persen teratas).

Keempat, pengangguran ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, tetapi memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti cenderung bersifat ‘*disequalizing*’ terhadap pembagian pendapatan.

Sejalan hasil temuan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, selanjutnya dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

Pertama, peningkatan modal manusia yang dilakukan melalui sektor pendidikan baik itu pendidikan formal maupun nonformal perlu lebih ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang karena ternyata hal ini memiliki dampak yang dapat menciptakan pemerataan pendapatan di Indonesia.

Kedua, kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita perlu lebih ditingkatkan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak seperti UMKM, sektor pertanian dan non-pertanian di daerah

perdesaan, pengembangan infrastruktur perdesaan yaitu jalan desa, listrik perdesaan dan irigasi perlu ditingkatkan.

Ketiga, tingkat inflasi yang rendah perlu dijaga karena dengan tingkat inflasi yang rendah, maka dampak adanya kenaikan tingkat inflasi akan cenderung menurunkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan makro baik dari sisi permintaan (kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar) maupun dari sisi penawaran (kebijakan upah dan harga).

Keempat, kebijakan upah minimum Provinsi yang selama ini perlu ditinjau kembali karena ternyata upah minimum Provinsi yang berlaku selama ini cenderung menciptakan ketimpangan dalam pembagian pendapatan di Indonesia.

Kelima, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel-variabel lain ke dalam model pembagian pendapatan seperti peubah perubahan struktur ekonom (*share* tenaga kerja sektor pertanian dan non pertanian, *share* PDRB pertanian dan non pertanian), variabel fiskal, perkembangan finansial (*financial deepening*), faktor kelembagaan, dan lain-lain. Selain itu, data *time series* yang digunakan perlu ditambah *series* sehingga lebih panjang misalnya menjadi 10 tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abounoori, E. (2003). *Unemployment, Inflation and Income Distribution: A Cross-Country Analysis*. Iranian Economic Review, ((IER), 8(9),1-11
- Ahluwalia, M. S. (1976). *Inequality, Poverty and Development*. *Journal of Development Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(76\)90027-4](https://doi.org/10.1016/0304-3878(76)90027-4)
- Alatas, V., & Cameron, L. A. (2008). *The impact of Minimum Wages on Employment in a Low-Income Country: a Quasi-Natural Experiment in Indonesia*. *Industrial and Labor Relations Review*. <https://doi.org/10.1177/001979390806100204>
- Albanesi, S. (2007). *Inflation and Inequality*. *Journal of Monetary Economics*. 54(4), pp.1088-1114. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.02.009>
- Amornthum, S. (2004). *Income Inequality, Inflation and Nonlinearity: The Case of Asian Economies No Title*. Retrieved from Article website: <http://www2.hawaii.edu/~amornthu/pdf/Paper610.pdf>

- Bird, K., & Manning, C. (2008). *Minimum Wages and Poverty in a Developing Country: Simulations from Indonesia's Household Survey*. *World Development*.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.012>
- Bittencourt, M. (2009). *Macroeconomic Performance and Inequality: Brazil, 1983-94*. *The Developing Economies*, 47(1), 30–52. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2009.00075.x>
- Bourguignon, F. (2004). *The Poverty-growth-inequality Triangle*. *Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi Working Papers*. Retrieved from <https://ideas.repec.org/p/ind/icrier/125.html>
- Bulíř, A. (2001). *Income Inequality: Does Inflation Matter?* IMF Staff Papers. <https://doi.org/10.5089/9781451928549.001>
- Checchi, D., & García-Penalosa, C. (2010). *Labour Market Institutions and the Personal Distribution of Income in the OECD*. *Economica*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2009.00776.x>
- Chenery, Hollis, Monteks S. Ahluwalia, Clive Bell, John Duloy, and Richard Jolly (1974). *Redistribution with Growth*. New York: Oxford University Press.
- Chun, N., & Khor, N. (2010). *Minimum Wages and Changing Wage Inequality in Indonesia*. ADB Economics Working Paper Series. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1632245>
- De Gregorio, J., & Lee, J. W. (2002). *Education and Income Inequality: New Evidence from Cross-Country Data*. *Review of Income and Wealth Series*, Vol.48(3), pp.395-416. <https://doi.org/10.1111/1475-4991.00060>
- Diah-Utari, G. A. & Retni Christina (2015). *Growth and Inequality in Indonesia: Does Kuznets Curve Hold?*. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, February, 11(2), pp. 93-111.
- Galli, R. & Van der Hoeven, R. (2001). *Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Inflation Rate*. *Employment Paper 2001/29*.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* 4th Edition. In Tata McGraw-Hill.
- Iradian, G. (20050). *Inequality, Poverty, and Growth: Cross-Country Evidence*. IMF Working Papers, No.05/28. <https://doi.org/10.5089/9781451860474.001>

- Jamal, H. (2006). *Does Inequality Matter for Poverty Reduction? Evidence from Pakistan's Poverty Trends*. *Pakistan Development Review*, 45(3), pp. 439-459. <https://doi.org/10.30541/v45i3pp.439-459>
- Keller, K.R.I. (2010). *How Can Education Policy Improve Income Distribution? An Empirical Analysis of Education Stages and Measures on Income Inequality*. *The Journal of Developing Areas*, 43(2), pp. 53-76. <https://doi.org/10.1353/jda.0.0052>
- Killick, T. (1981). *Policy Economics: A Textbook on Applied Economics for Developing Countries*. Heinemann London.
- Kumba, D. (2009). *Education inequality, economic growth, and income inequality: Evidence from Indonesia, 1996-2005*. MPRA Paper No. 17792
- Kuznets, S. (1955). *Economic Growth And Income Inequality*. *The American Economic Review* Volume XLV March, 45(1), pp. 1-28. American Economic Association.
- Law, S. H., & Tan, H. B. (2009). *The Role of Financial Development on Income Inequality in Malaysia*. *Journal of Economic Development*, 34(2), pp. 1-17.
- Li, H., & Zou, H. F. (2002). *Inflation, Growth, and Income Distribution: A Cross-Country Study*. *Annals of Economics and Finance*, 3, pp. 85-101.
- Maestri, V., & Roventini, A. (2012). *Inequality and Macroeconomic Factors: A Time-Series Analysis for a Set of OECD Countries*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2181399>
- Mughal, M. Y., & Diawara, B. (2011). *Explaining Income Inequalities in Developing Countries: the Role of Human Capital*. Working Papers. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/tac/wpaper/2011-2012_2.html
- Odedokun, M. O., & Round, J. I. (2004). *Determinants of Income Inequality and Its Effects on Economic Growth: Evidence from African Countries*. *African Development Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1017-6772.2004.00093.x>
- Perkins, Dwight H., S. C. Radelet, Donald R. Snodgrass, & Malcolm Gillis, (2001). *Economics of Development*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Perugini, C., & Martino, G. (2008). *Income Inequality within European Regions: Determinants and Effects on Growth*. *Review of Income and Wealth*. 54(3), pp. 373-406. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2008.00280.x>

- Ramanathan, R. (1992). *Introductory Econometrics With Applications (Second)*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., & Sumarto, S. (2003). *Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(1), pp. 29-50. <https://doi.org/10.1080/00074910302007>
- Todaro, M.P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development (11th ed.)*. Pearsons Publishing Ltd.
- Tridico, P. (2010). *Growth, Inequality and Poverty in Emerging and Transition Economies*. *Transition Studies Review*, 16(4), 979–1001. <https://doi.org/10.1007/s11300-009-0116-8>
- Volscho, T. W. (2005). *Minimum Wages and Income Inequality in the American States, 1960-2000*. *Research in Social Stratification and Mobility*. [https://doi.org/10.1016/S0276-5624\(05\)23011-1](https://doi.org/10.1016/S0276-5624(05)23011-1)
- Yue, H.-Y. (2011). *Income Inequality, Economic Growth and Inflation: A Study on Korea*. *International Journal of Economics and Research*, 2(5), 14–21. Retrieved from [https://www.ijeronline.com/documents/volumes/Vol 2 issue 5/ijer20110205SO\(2\).pdf](https://www.ijeronline.com/documents/volumes/Vol%20issue%205/ijer20110205SO(2).pdf)